



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DEPUTI BIDANG OPERASI SAR  
BADAN SAR NASIONAL  
TAHUN 2014

DEPUTI BIDANG OPERASI SAR  
BADAN SAR NASIONAL

---

## KATA PENGANTAR

Badan SAR Nasional merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas di bidang pencarian dan pertolongan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014, Deputi Bidang Operasi SAR merupakan bagian dari Badan SAR Nasional yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Operasi telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun Anggaran 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan SAR Nasional yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (*good governance*).

---

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas dimasa yang mendatang dapat berjalan lebih baik lagi sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta,       Maret 2015  
**Deputi Bidang Operasi SAR**

**Tatang Zaenudin**  
**Mayor Jenderal TNI**

---

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....                                  | 1         |
| Daftar Isi.....                                       | 3         |
| Ringkasan Eksekutif .....                             | 4         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>5</b>  |
| 1. Latar Belakang.....                                | 5         |
| 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....                  | 8         |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b> | <b>10</b> |
| 3. Visi dan Misi .....                                | 10        |
| 4. Tujuan Dan Sasaran .....                           | 10        |
| 5. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....           | 11        |
| 6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014.....            | 11        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                  |           |
| 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 .....        | 15        |
| 8. Prosedur Pengumpulan Data .....                    | 16        |
| 9. Analisis Pencapaian Kinerja.....                   | 17        |
| 10. Akuntabilitas Keuangan.....                       | 26        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                           | <b>28</b> |

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi sejak tahun 1998, tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *good governance*. Salah satu perwujudan *good governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon I wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Operasi SAR dalam Tahun Anggaran 2014 secara umum telah dapat terlaksana dengan baik. Dilihat dari evaluasi kinerja kegiatan dari tiap-tiap pelaksanaan kegiatan (sesuai formulir Rencana Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran) maka rata-rata tingkat capaian sasaran Deputi Bidang Operasi SAR sebesar 98,09% Nilai Rata-Rata Tingkat Capaian ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kegiatan *Search and Rescue* (SAR) adalah usaha berupa kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya baik dalam pelayaran, penerbangan, bencana maupun musibah lainnya. Kegiatan ini bersifat represif dalam kegiatan keselamatan yang dilakukan setelah musibah terjadi.

Lembaga pelaksana yang menyelenggarakan SAR ini adalah Badan SAR Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Wilayah Republik Indonesia yang terletak dalam jalur perhubungan antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera yang sangat vital dan strategis, baik bagi kegiatan penerbangan maupun pelayaran internasional, bertanggung jawab dalam upaya keselamatan serta penyelamatan tanpa memandang bendera kebangsaan, jenis kegiatan maupun kepentingannya.

Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kecenderungan globalisasi, arus penerbangan dan pelayaran nasional maupun internasional semakin meningkat. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu maka Indonesia akan dikategorikan sebagai “black area” untuk pelayaran dan penerbangan. Status “black area” dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional.

---

Peningkatan jumlah kecelakaan transportasi khususnya transportasi laut dan udara sekarang ini menuntut peningkatan pelayanan SAR kepada masyarakat baik peningkatan secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam hal ini penanggulangan kecelakaan transportasi dituntut untuk memenuhi standard penyelenggaraan SAR yang berlaku Internasional, khususnya yang ditetapkan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *International Maritime Organization (IMO)* sehingga kemampuan SAR Nasional menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi.

Pentingnya penyelenggaraan SAR tidak terbatas pada kepentingan nasional, tetapi juga internasional. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *International Maritime Organization (IMO)* serta anggota *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)* diwajibkan membentuk organisasi SAR yang memiliki kemampuan dan kesiapan melaksanakan koordinasi serta kegiatan operasi SAR di dalam wilayah tanggung jawabnya, serta melakukan kerjasama dengan negara tetangga sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Pada perkembangan pelaksanaannya, penyelenggaraan SAR tidak hanya terbatas pada musibah pelayaran dan penerbangan saja, akan tetapi juga penanggulangan terhadap bencana dan musibah lainnya sehingga pelayanan SAR makin dibutuhkan oleh masyarakat.

Tolok ukur pelayanan SAR yang baik adalah kecepatan respons berupa pengerahan potensi SAR serta keberhasilan operasi berupa dapat tidaknya korban ditemukan dan ditolong. Keberhasilan pelayanan SAR ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu koordinasi dalam arti luas, ketrampilan penyelenggaraan SAR serta fasilitas SAR. Koordinasi yang baik akan ditentukan secara bersama-sama oleh mekanisme pengerahan tenaga dan fasilitas serta kerjasama dalam operasi. Keterampilan ditentukan oleh pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,

---

sedangkan faktor fasilitas ditentukan oleh keberadaan-keberadaan fasilitas pendukung operasi SAR.

Badan SAR Nasional merupakan Institusi Pemerintah sebagai pelaksana tugas dibidang pencarian dan pertolongan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue* (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional. Berbagai tuntutan terhadap pelayanan SAR Nasional menyebabkan perlunya peningkatan fungsi Badan SAR Nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 Deputi Bidang Operasi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi sejak tahun 1998, tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Hasil pelaksanaan tugas yang akuntabel tersebut antara lain dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas yang setiap tahun disusun.

Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

---

KKN, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon I wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Guna memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Operasi SAR sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Operasi SAR Tahun Anggaran 2014.

## **2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

### **a. Kedudukan**

Berdasarkan PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014, Deputy Bidang Operasi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Basarnas di bidang Operasi SAR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.

### **b. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014, Deputy Bidang Operasi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.

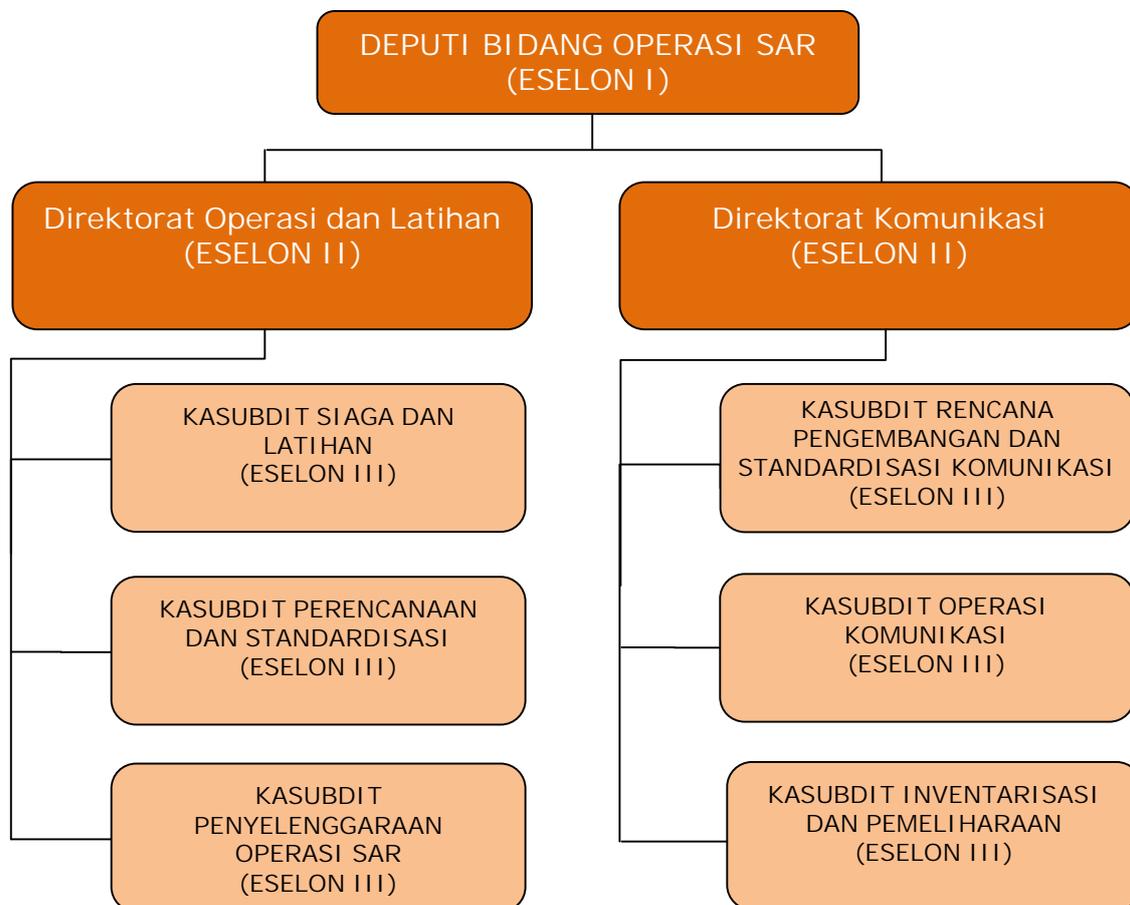
---

### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Deputi Bidang Operasi SAR menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;
- 2) Pelaksanaan siaga SAR;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
- 4) Perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
- 5) Penyusun petunjuk latihan operasi SAR;
- 6) Pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi SAR;
- 7) Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi SAR;
- 8) Pemeliharaan dan penyusunan petunjuk operasi alat komunikasi;
- 9) Evaluasi pelaksanaan operasi SAR dan latihan operasi SAR.

### d. Struktur Organisasi



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Operasi SAR.

---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **3. VISI DAN MISI**

##### **a. Visi**

Deputi Bidang Operasi SAR mempunyai visi yang mengacu pada visi Badan SAR Nasional yaitu "Berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman".

##### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidang Operasi SAR mempunyai misi yaitu "Merumuskan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasi SAR yang efisien dan efektif melalui tindak awal yang optimal dengan pengerahan potensi SAR yang didukung oleh prosedur kerja yang terstandardisasi".

#### **4. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **a. Tujuan**

Terwujudnya perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui siaga, tindak awal, penyelenggaraan operasi SAR yang maksimal serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, fasilitas SAR yang memadai dan prosedur kerja yang terstandardisasi.

##### **b. Sasaran**

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan SAR;
- 2) Meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR;
- 3) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana;
- 4) Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR.

---

## 5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Deputi Bidang Operasi SAR sebagaimana telah digariskan tersebut di atas, dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui kebijakan, program, dan kegiatan sebagai berikut:

### a. Kebijakan

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi SAR, koordinasi, pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR, kerjasama di bidang operasi dan latihan SAR, serta pelaksanaan siaga SAR.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pengoperasian dan pemeliharaan peralatan komunikasi, penyiapan peralatan komunikasi, rencana pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengembangan sistem peralatan bidang komunikasi SAR.

### b. Program

Berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2010-2014, Deputi Bidang Operasi SAR didukung dengan 1 (satu) program teknis, yaitu Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan. Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SAR serta pembinaan pengawakan, terselenggaranya diklat SAR, pengelolaan operasi dan latihan SAR, dan terlaksananya pengelolaan sistem peralatan komunikasi SAR.

## 6. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2014

Perjanjian Kinerja merupakan merupakan kontrak kerja dalam melaksanakan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidang Operasi SAR telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>                     | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> | <b>PAGU ANGGARAN</b> |
|--|---|---------------|----------------------|
| Meningkatnya pelayanan pelayanan operasi SAR | 1. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah pelayaran   | 2 Jam         | Rp. 16.322.501.000   |
|  | 2. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah penerbangan | 1 Jam         |                      |
|  | 3. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana             | 1 Jam         |                      |
|  | 4. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah lainnya     | 2 Jam         |                      |

|  |  |           |                       |
|--|--|-----------|-----------------------|
| Meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR  | 1. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR  | 90 %      |                       |
|  | 2. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR   | 95 %      |                       |
| Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah / bencana | 1. Rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR   | 10 Menit  | Rp. 5.819.991.000,-   |
|  | 2. Persentase kecukupan personil siaga <i>rescuer</i> pada Kantor SAR  | 100 %     |                       |
|  | 3. Persentase terlaksananya pembinaan operator dan teknisi komunikasi serta pengembangan sistem komunikasi dengan teknologi yang berkesinambungan. | 100 %     | Rp. 184.450.000.000,- |
|  | 4. Persentase terlaksananya pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan peningkatan peralatan komunikasi serta pelaksanaan siaga komunikasi.        | 100%      |                       |
| Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan            | 1. Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR   | 475 orang | Rp. 6.269.861.000,-   |

---

|             |  |      |                    |
|-------------|--|------|--------------------|
| operasi SAR | 2. Rata-rata persentase keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR | 90 % | Rp. 16.322.501.000 |
|-------------|--|------|--------------------|

Tabel 2.1. Tabel Penetapan Kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014

---

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau realisasi kinerja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran akuntabilitas kinerja tersebut tentunya tetap diperhitungkan sumber daya yang mendukung, baik SDM, Fasilitas kerja maupun anggaran yang tersedia sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih optimal. Pada setiap akhir periode, dilakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

#### 7. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*), adalah sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama   | Target            | Realisasi         | Kinerja % |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. Kecepatan tanggap ( <i>response time</i> ) pada operasi SAR dalam penanganan musibah/ bencana  | 1 Jam<br>30 Menit | 1 Jam<br>09 Menit | 130,15%   |
| 2. Keberhasilan evakuasi korban pada penanganan operasi SAR dalam musibah/ bencana                | 100%              | 98,40%            | 98,40%    |
| 3. Persentase kesiapan sarana komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang optimal | 100 %             | 100 %             | 100 %     |

Table 3.1. Tabel Indeks Kinerja Utama Deputi Bidang Operasi SAR

---

Indikator Kinerja Utama tersebut didukung oleh 4 (empat) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Sasaran tersebut antara lain adalah: meningkatnya pelayanan operasi SAR, meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR, Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana dan meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR.

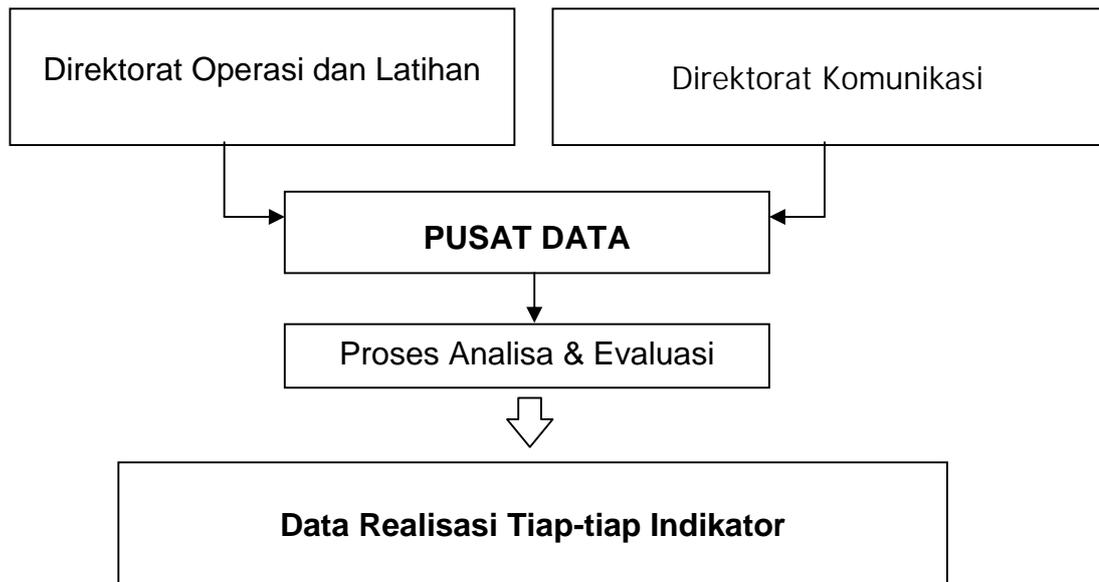
| No. | Kategori | Nilai Angka (%) | Interprestasi |
|-----|----------|-----------------|---------------|
| 1.  | A        | 86 – 100        | Sangat Baik   |
| 2.  | B        | 66 – 85         | Baik          |
| 3.  | C        | 51 – 65         | Cukup         |
| 4.  | D        | 0 – 50          | Kurang        |

Tabel 3.2. Penilaian Pencapaian Kinerja

Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Operasi SAR dapat dikatakan **sangat baik** dengan **kategori A** dan sudah memenuhi target capaian kinerja, yaitu rata-rata sebesar 98,09%. Pemenuhan capaian kinerja Deputi Bidang Operasi SAR tersebut dijelaskan pada bab/ sub bab berikutnya.

## 8. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Pengukuran Capaian Kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dan Realisasi dari tiap-tiap indikator. Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari Direktorat Operasi dan Latihan dan Direktorat Komunikasi, baik data administratif maupun data teknis. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pengumpulan data tersebut sebagaimana pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Prosedur Pengumpulan Data

## 9. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014 diukur dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yaitu:

- a. Capaian kinerja kecepatan tanggap (*response time*) pada operasi SAR dalam penanganan musibah/ bencana sebesar 76,83%, berasal dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan SAR.

*Response Time* adalah ukuran kecepatan upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lain-lain. *Response Time* ditentukan berdasarkan waktu informasi musibah diterima sampai dengan kesiapan *SAR Rescue Unit (SRU)* untuk diberangkatkan ke lokasi musibah/ bencana.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan adalah seperti di dalam table berikut:

| No | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi      | %      | Target | Realisasi      | %      |
|----|--|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|
|    |  | 2013   |                |        | 2014   |                |        |
| 1. | Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah pelayaran   | 3 Jam  | 1 Jam 6 Menit  | 163,33 | 2 Jam  | 1 jam 47 menit | 111,51 |
| 2. | Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah penerbangan | 2 Jam  | 42 menit       | 185    | 1 Jam  | 57 menit       | 104,48 |
| 3. | Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana             | 2 Jam  | 33 menit       | 172,5  | 1 Jam  | 51 menit       | 116,15 |
| 4. | Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah lain-lain   | 3 Jam  | 2 jam 40 menit | 171,67 | 2 Jam  | 59 menit       | 200,34 |

Tabel 3.3. Indikator Sasaran meningkatnya kualitas pelayaran SAR

Pada tabel 3.3. di atas Persentase capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan musibah pelayaran, musibah penerbangan, bencana dan musibah lain-lain sudah mencapai target atau lebih dari 100%.

Rata-rata *response time* pada tahun 2014 meningkat jika dibanding dengan rata-rata *response time* pada tahun 2013. Semakin kecil nilai *response time* berarti semakin cepat waktu yang diperlukan untuk oleh Badan SAR Nasional untuk menyiapkan SRU menuju ke lokasi musibah/ bencana. Hal ini menggambarkan kinerja Badan SAR Nasional yang semakin baik. Peningkatan kinerja ini terjadi karena adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Badan SAR Nasional dengan Kantor SAR di daerah, kesiapsiagaan dalam melaksanakan tindak awal yang maksimal, serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap.

---

Target kinerja yang ditetapkan digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran yang dipenuhi dengan tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan musibah pelayaran pada tahun 2013 adalah 163,33% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 111,51% dari rata-rata waktu yang ditargetkan adalah 2 jam, terealisasi sebesar 1 jam 47 menit;
- 2) Capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan musibah penerbangan pada tahun 2013 adalah 185% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 104,48% dari rata-rata waktu yang ditargetkan adalah 1 jam, terealisasi sebesar 57 menit;
- 3) Capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan bencana pada tahun 2013 adalah 172,5% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 116,15% dari rata-rata waktu yang ditargetkan adalah 1 jam, terealisasi sebesar 51 menit;
- 4) Capaian kinerja rata-rata *response time* pada penanganan musibah lain-lain pada tahun 2013 adalah 171,67% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 200,34% dari rata-rata waktu yang ditargetkan adalah 2 jam, terealisasi sebesar 59 menit.

Perbandingan *response time* pada musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya

Tabel perbandingan *response time* pada musibah pelayaran:

| Tahun      | Target | Realisasi      | Capaian Kinerja |
|------------|--------|----------------|-----------------|
| Tahun 2010 | 6 jam  | 5 jam 10 menit | 113,89%         |
| Tahun 2011 | 5 jam  | 3 jam 35 menit | 128,33%         |
| Tahun 2012 | 4 jam  | 2 jam 50 menit | 129,17%         |
| Tahun 2013 | 3 jam  | 1 jam 6 menit  | 163,33%         |
| Tahun 2014 | 2 jam  | 1 jam 47 menit | 111,51%         |

Tabel perbandingan response time pada musibah penerbangan:

| Tahun      | Target | Realisasi      | Capaian Kinerja |
|------------|--------|----------------|-----------------|
| Tahun 2010 | 5 jam  | 2 jam 05 menit | 158,33%         |
| Tahun 2011 | 4 jam  | 1 jam 32 menit | 161,67%         |
| Tahun 2012 | 3 jam  | 1 jam 07 menit | 162,78%         |
| Tahun 2013 | 2 jam  | 42 menit       | 185%            |
| Tahun 2014 | 1 jam  | 57 menit       | 104,48          |

Tabel perbandingan response time pada bencana:

| Tahun      | Target | Realisasi      | Capaian Kinerja |
|------------|--------|----------------|-----------------|
| Tahun 2010 | 5 jam  | 3 jam 11 menit | 136,33%         |
| Tahun 2011 | 4 jam  | 1 jam 7 menit  | 172,08%         |
| Tahun 2012 | 3 jam  | 50 menit       | 172,22%         |
| Tahun 2013 | 2 jam  | 33 menit       | 172,5%          |
| Tahun 2014 | 1 jam  | 51 menit       | 116,15%         |

- b. Capaian kinerja keberhasilan evakuasi korban pada penanganan operasi SAR dalam musibah/ bencana sebesar 98,40%, berasal dari sasaran strategis meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana dan meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR, seperti di bawah ini:

- 1) Sasaran strategis meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja seperti di dalam tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja   | Target | 2013      |        |        | 2014      |        |  |
|----|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--|
|    |   |        | Realisasi | %      | Target | Realisasi | %      |  |
| 1. | Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR  | 90%    | 95,58%    | 106.19 | 90%    | 94,60%    | 107,51 |  |
| 2. | Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR | 95%    | 98.66%    | 103.85 | 95%    | 98,40%    | 103,58 |  |

Table 3.4. Indikator sasaran meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR

---

Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR diukur dari jumlah korban selamat baik dalam keadaan sehat, luka ringan dan luka berat dari jumlah korban musibah/ bencana dibandingkan dengan total jumlah korban baik yang selamat, meninggal, dan hilang. Sedangkan persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR diukur dari jumlah korban yang ditemukan, baik dalam kondisi selamat dan meninggal dibandingkan dengan total jumlah korban baik yang selamat, meninggal, dan hilang.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR pada tahun 2014 ini sangat baik, terlihat pada pemenuhan 2 (dua) indikator kinerjanya seperti di bawah ini:

- a) Persentase jumlah korban terselamatkan pada tahun 2013 adalah 106.19% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 94,60%. Nilai ini didapatkan dari persentase yang ditargetkan adalah 90% sedangkan realisasinya sebesar 94,60%.
  - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR pada tahun 2013 adalah 103.85% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 98,40%. Nilai ini didapatkan dari persentase yang ditargetkan adalah 95% sedangkan realisasinya sebesar 98,40%.
- 2) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana, terdiri dari 2 indikator kinerja seperti berikut:
- a) Rata-rata waktu tidak awal pelaksanaan operasi SAR Waktu tindak awal dalam penyelenggaraan operasi SAR adalah untuk mengukur seberapa cepat upaya mencari kebenaran informasi musibah/ bencana yang diterima dengan alat komunikasi (dimana tahapan ini disebut *preliminary*

*communication–extended communication*) untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak awal pelaksanaan operasi SAR dilakukan apabila laporan berita terjadinya musibah/ bencana berasal dari sumber yang dianggap belum jelas kebenarannya, misalnya adanya *signal distress* yang diterima oleh satelit atau laporan dari individu/ perusahaan.

| No | Indikator Kinerja                                   | Target   | Realisasi | %   | Target   | Realisasi | %   |
|----|---|----------|-----------|-----|----------|-----------|-----|
|    |   | 2013     |           |     | 2014     |           |     |
| 1. | Rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR | 10 menit | 10 menit  | 100 | 10 menit | 10 menit  | 100 |

Tabel 3.5. Capaian indikator kinerja rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR.

Rata-rata tindak awal dalam penyelenggaraan operasi SAR pada Tahun 2014 mengalami kesamaan pada tidak awal pada Tahun 2013, yaitu 10 menit pada tahun 2013 dan 10 menit pada Tahun 2014.

b) Persentase kecukupan personil Siaga Rescuer pada Kantor SAR.

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan setiap operasi SAR, maka harus didukung dengan adanya kesiapsiagaan personil dan sarana SAR yang memadai. Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan SAR dalam musibah dan bencana.

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %    | Target | Realisasi | %   |
|----|---|--------|-----------|------|--------|-----------|-----|
|    |   | 2013   |           |      | 2014   |           |     |
| 1. | Persentase kecukupan personil Siaga Rescuer pada Kantor SAR | 75%    | 50%       | 66,6 | 100%   | 100%      | 100 |

Tabel 3.6. Capaian indikator kinerja persentase kecukupan personil siaga Rescuer pada Kantor SAR .

Kesiapsiagaan yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam yang meliputi siaga *rescuer*, siaga komunikasi, siaga Awak Buah Kapal (ABK), dan siaga kepala siaga SAR. Kecukupan personil siaga terutama siaga *rescuer* berpengaruh besar pada keberhasilan operasi SAR yang efektif dan efisien.

Masih kurangnya personil dalam siaga *rescuer* sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan SAR Nasional khususnya *response time* dikarenakan apabila terjadi musibah/ bencana, maka masih harus menunggu kelengkapan jumlah *rescuer* untuk berkumpul karena personil yang melakukan siaga *rescuer* rata-rata hanya 4 (empat) personil.

Untuk mengatasi kekurangan personil *rescuer* tersebut Badan SAR Nasional telah mengajukan penambahan tenaga *rescuer* dari penerimaan pegawai baru pada Tahun Anggaran 2014 ini. Meningkatnya peran serta instansi/ organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja seperti di dalam tabel di bawah ini:

| No | Indikator Kinerja   | Target | 2013      |        | 2014   |           | %      |
|----|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
|    |   |        | Realisasi | %      | Target | Realisasi |        |
| 1. | Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR           | 400    | 695       | 173,75 | 475    | 756       | 159,16 |
| 2. | Rata-rata persentase keterlibatan potensi SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR | 80%    | 102.29%   | 127,88 | 90%    | 107%      | 119,70 |

Tabel 3.7. Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR

Dengan adanya instansi/ organisasi potensi SAR yang cukup maka pelaksanaan operasi SAR dapat ditangani lebih maksimal. Apabila musibah/ bencana terjadi di daerah yang jaraknya jauh dan sulit dijangkau oleh Kantor SAR dan Pos SAR, dengan adanya organisasi potensi SAR yang terlatih maka akan sangat membantu pelaksanaan operasi SAR.

Untuk membentuk instansi/ organisasi potensi SAR yang terlatih maka diperlukan pembinaan yaitu dengan mengikutsertakannya dalam latihan SAR, diharapkan dengan mengikuti latihan SAR, instansi/ organisasi potensi SAR tersebut dapat membantu melaksanakan operasi SAR. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya peran serta instansi/ organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan latihan SAR dan operasi SAR pada tahun 2014 ini sangat baik, terlihat pada pemenuhan 2 (dua) indikator kinerjanya seperti di bawah ini:

- a) Jumlah keterlibatan personil instansi/ organisasi potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR pada tahun 2014 telah mencapai 159,16% dari yang ditargetkan 475 orang, terealisasi sebesar 756 orang.
- b) Rata-rata persentase keterlibatan instansi/ organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR pada tahun 2014 telah mencapai 119,70 % dari yang ditargetkan 90%, terealisasi sebesar 107%;
- c. Capaian kinerja **kesiapan sarana komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang optimal** sebesar 100 %, Sasaran ini terdiri dari 2 indikator kinerja seperti berikut:
  - 1) Capaian kinerja persentase terlaksananya pembinaan operator dan teknisi komunikasi serta pengembangan sistem komunikasi dengan teknologi yang berkesinambungan mencapai nilai 100% seperti yang telah ditargetkan.

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %   |
|----|---|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|
|    |   | 2013   |           |     | 2014   |           |     |
| 1. | Persentase terlaksananya pembinaan operator dan teknisi komunikasi serta pengembangan sistem komunikasi dengan teknologi yang berkesinambungan. | 100%   | 100%      | 100 | 100 %  | 104%      | 104 |

Tabel 3.7. Capaian indikator kinerja terlaksananya pembinaan persentase operator dan teknisi komunikasi.

Hal ini disebabkan karena dalam pembinaan operator dan teknisi komunikasi telah diselenggarakan secara rutin. Pelatihan kecakapan operator radio komunikasi dasar dan lapangan dilaksanakan dengan sasaran membekali petugas operator radio komunikasi dalam tugas sehari-hari maupun fungsinya sebagai pusat informasi dan penjamin jalur komunikasi dalam penyelenggaraan operasi SAR dengan baik.

Selain itu juga dilaksanakan penyusunan prosedur komunikasi yang digunakan sebagai panduan teknis maupun administratif di bidang komunikasi.

- 2) Persentase terlaksananya pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan peningkatan peralatan komunikasi serta pelaksanaan siaga komunikasi mencapai nilai 100% seperti yang telah ditargetkan.

| No | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | %   | Target | Realisasi | %   |
|----|---|--------|-----------|-----|--------|-----------|-----|
|    |   | 2013   |           |     | 2014   |           |     |
| 1. | Persentase terlaksananya pemeliharaan , inventarisasi, penyiapan dan peningkatan peralatan komunikasi serta pelaksanaan siaga komunikasi. | 100%   | 100%      | 100 | 100 %  | 100%      | 100 |

Tabel 3.8. Persentase terlaksananya pemeliharaan , inventarisasi, penyiapan dan peningkatan peralatan komunikasi serta pelaksanaan siaga komunikasi.

Laporan performance dan inventaris disusun untuk mengetahui kondisi peralatan komunikasi yang dimiliki oleh unit pelaksana teknis (UPT) dan kantor pusat Badan SAR Nasional, hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi peralatan yang dimiliki Basarnas khususnya dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang maksimal.

## 10. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Operasi SAR pada tahun Anggaran 2014 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total anggaran sebesar Rp. 218.183.946.000,-. Sedangkan realisasi anggaran yang dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 214.015.649.692,- atau persentase pencapaiannya sebesar 98,09%.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | PAGU ANGGARAN        | REALISASI            | %     |
|---|--|----------------------|----------------------|-------|
| Meningkatnya pelayanan operasi SAR  | 1. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah pelayaran      | Rp. 16.322.501.000,- | Rp. 14.476.083.678,- | 88,69 |
|   | 2. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah penerbangan    |                      |                      |       |
|   | 3. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana                |                      |                      |       |
|   | 4. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah lainnya        |                      |                      |       |
| Meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR | 1. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR  |                      |                      |       |
|   | 2. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR |                      |                      |       |
| Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi                             | 1. Rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR                   |                      |                      |       |

|   |  |                       |                      |       |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------|
| i terjadinya musibah / bencana  | 2.Persentase kecukupan personil siaga <i>rescuer</i> pada Kantor SAR   | Rp. 5.819.991.000,-   | Rp. 5.591.395.900,-  | 96,07 |
|   | 3.Persentase terlaksananya pembinaan operator dan teknisi komunikasi serta pengembangan sistem komunikasi dengan teknologi yang berkesinambungan | Rp. 184.450.000.000,- | Rp.183.176.888.900,- | 99,31 |
|   | 4.Persentase terlaksananya pemeliharaan , inventarisasi, penyiapan dan peningkatan peralatan komunikasi serta pelaksanaan siaga komunikasi.      |                       |                      |       |
|   |  |                       |                      |       |
| Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR | 1.Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR  | Rp. 6.269.861.000,-   | Rp.6.122.395.400,-   | 97,65 |
|   | 2.Rata-rata persentase keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR  | Rp. 16.322.501.000,-  | Rp. 14.476.083.678,- | 88,69 |

Tabel 3.9. Akuntabilitas Keuangan Deputi Bidang Operasi SAR Tahun 2014

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam Tahun Anggaran 2014, Deputi Bidang Operasi SAR secara keseluruhan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan perhatian untuk penyempurnaan.

Dari hasil evaluasi kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2014, realisasi rata-rata sasaran sebesar 98,09%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja secara keseluruhan Deputi Bidang Operasi SAR dalam melaksanakan kegiatannya pada Tahun Anggaran 2014. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu belum optimalnya perumusan kebijakan-kebijakan di bidang SAR yaitu Pedoman Pelaksanaan Operasi SAR sebagai acuan dalam operasi SAR yang sampai saat ini belum direalisasikan sebagai kebijakan teknis dibidang SAR serta peningkatan kerjasama dengan instansi berpotensi SAR dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pemasyarakatan kegiatan SAR.

Tugas pemberian bantuan dan pelayanan SAR diemban oleh Badan SAR Nasional yang telah dilaksanakan dengan baik pada Tahun Anggaran 2014, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik dalam lingkungan jajaran Departemen Perhubungan maupun seluruh instansi/ organisasi potensi SAR. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Badan SAR Nasional secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

Peningkatan kinerja di seluruh kegiatannya mutlak diperlukan pada tahun-tahun berikutnya untuk mewujudkan Visi Badan SAR Nasional yaitu berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap tempat dan waktu dengan cepat, handal dan aman.

---

Terkait dengan perkembangan saat ini, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan dari Deputi Bidang Operasi SAR, yaitu perumusan dan implementasi kebijakan di bidang SAR diharapkan dapat disempurnakan dan disosialisasikan untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional demi lancarnya pelaksanaan operasi dan kegiatan SAR.

Kiranya LAKIP Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Deputi Bidang Operasi SAR, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Deputi Bidang Operasi SAR akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.